



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2027



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	7
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
 BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	12
3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	12
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2027	13
 BAB IV PENUTUP	
 LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-NYA, Rencana Kerja Tahun 2027 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selesai disusun.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang terarah, berdayaguna dan berhasil guna harus diawali dengan perencanaan yang matang dan dituangkan dalam bentuk alokasi dana serta sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Rencana Kerja tahun 2025 untuk dijadikan acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, perlu dukungan semua pihak termasuk aparat pengelola Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Demikianlah Kata Pengantar yang dapat kami sampaikan dan kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Rencana Kerja tahun 2027.

Palembang,

Februari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197106031991011002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dipahami bahwa dalam pembangunan dibutuhkan perencanaan yang merupakan rangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam bagian perencanaan tersebut akan lahir kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dengan prinsip untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat luas. Namun demikian, harus dipahami pula meskipun perencanaan yang disusun sudah melalui proses yang panjang dan dianggap matang, harus pula diberi peluang untuk tanggap terhadap perubahan mengingat berbagai dinamika pembangunan. Dinamika yang dihadapi pemerintah dalam perencanaan pembangunan tidak hanya dalam lingkup birokrasi itu sendiri, tapi yang paling utama adalah dinamika yang terjadi di masyarakat baik itu masyarakat umum maupun masyarakat dunia usaha. Demikian dinamika politik, terutama di Indonesia dimana umumnya nuansa politik cukup kental berpengaruh dalam proses perencanaan pembangunan.

Perencanaan yang tanggap terhadap perubahan sebagaimana dijelaskan di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan yang tidak hanya dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan akan tetapi dilakukan secara berkala. Hal tersebut adalah bertujuan untuk menjaga pembangunan menuju pada arah yang tepat (*on track*), sehingga meskipun terjadi pergeseran kebijakan hanya berupa penajaman dan tidak mengubah tujuan akhir dari perencanaan.

Hal tersebut merupakan salah satu kewajiban pokok yang semata-mata menjadi fokus penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025, yang diantaranya dilakukan dengan penghematan/efisiensi beberapa fokus kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera

Selatan dengan tidak mengurangi target capaian RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang harus dipenuhi.

Kebutuhan akan perubahan untuk mengakomodir dinamika pembangunan di Sumatera Selatan tersebut harus dibarengi pula dengan kemampuan pendanaan yang berfungsi untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan yang dirasakan mendesak untuk dilaksanakan pada tahun berjalan. Selain itu bisa juga dilakukan dengan pergeseran beberapa program prioritas sehingga pembangunan bisa berjalan lebih baik lagi dengan hasil yang lebih optimal. Adapun hal yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan Perubahan APBD, antara lain keadaan yang menyebabkan perlunya pergeseran anggaran antar unit kegiatan dan antar jenis belanja serta adanya saldo anggaran lebih (SILPA) tahun sebelumnya yang harus dimanfaatkan dalam tahun berjalan.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun guna mengoperasionalkan SKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama satu tahun, sedangkan tujuannya adalah :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
3. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra dan Renja OPD untuk menunjang pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renja Perubahan OPD, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

- 1.1 Latar Belakang, memuat tentang Renja OPD, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja.
- 1.2 Landasan Hukum, menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

- 1.3 Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja OPD.
- 1.4 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

- 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
- 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2027, Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan mempunyai sasaran Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas). Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan ke dalam indikator kinerja yaitu Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSBUD.

Target *penurunan potensi konflik* dicapai dengan kegiatan, Pembinaan dan Pembekalan Deteksi Dini Terhadap Ancaman Stabilitas Daerah, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Provinsi Sumatera Selatan, Pelestarian Seni dan Budaya Daerah Berwawasan Kebangsaan melalui Pagelaran dan Pelaku Seni, Pembekalan Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Pembinaan dan Pengimplementasian terhadap 4 Konsensus Dasar, Pembentukan Tenaga Penggerak Pembauran, kegiatan Pembekalan Peningkatan Pemahaman Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik, kegiatan Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik Sosial, Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan, Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Guna terwujudnya pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu didukung sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan dengan adanya struktur organisasi yang baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan belum didukung sarana dan prasarana yang memadai yaitu masih terbatasnya ruang penyimpan dokumen, belum adanya sarana prasarana pada ruang pertemuan, lingkungan/halaman kantor kurang representative, belum

layaknya tempat parkir karyawan, dan sarana prasarana ruang pelayanan kurang memadai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung sebanyak 46 orang.

a. Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Susunan Kepegawaian berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Juru/I (Orang)	0
2.	Pengatur/II (Orang)	4
3.	Penata/III (Orang)	17
4.	Pembina/IV (Orang)	9
5.	Ahli Pertama/IX	5
6.	Terampil/VII	7
7.	Pemula/V	4
TOTAL		46

b. Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Jabatan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Susunan Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan/Struktural/Fungsional	Jumlah (Orang)
1.	Esselon II	1
2.	Esselon III	5
3.	Esselon IV	10
4.	Fungsional	56
TOTAL		72

- c. Susunan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan
Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan tingkat pendidikan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3

Susunan Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SD/SMP	2
2	SLTA	11
3.	S1/DIV	33
4.	S2	24
5.	S3	2
TOTAL		72

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Gubernur di Bidang Kesatuan Bangsa, Demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif, selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat tentunya juga sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi, menghargai dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Badan Kesbangpol merawat Kesatuan Bangsa melalui kepekaan dan cegah dini untuk membangun Demokrasi yang bermartabat dan elegan.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang cukup luas akan munculnya realitas kehidupan Bangsa Indonesia, dewasa ini yang masih dalam situasi kritis multi dimensional, kritis moneter dan ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis sosial dan krisis politik yang ditandai dengan terjadinya berbagai konflik horisontal maupun konflik vertikal yang perlu mendapat perhatian dalam aspek Kesbangpol.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan akar permasalahan pembangunan daerah yang secara umum dirasakan oleh masyarakat, maka permasalahan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan khususnya yang berkaitan dengan aspek Kesbangpol dapat diidentifikasi berdasarkan fakta atau kondisi aktual kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti :

1. Kecendrungan pergeseran dalam nilai-nilai budaya Indonesia sebagai Negara Timur yang mengarah kepada budaya yang tidak santun.
2. Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.
3. Euforia demokrasi secara berlebihan.
4. Penguatan paham dan sikap anti pluralisme.
5. Kecendrungan mengembangkan perilaku menghujat antar sesama anak bangsa yang tidak sesuai lagi dengan norma-norma dan sendi-sendi kehidupan bangsa, dan hujatan tersebut khususnya diarahkan kepada pemimpin.
6. Banyaknya PNS terkait dengan masalah Hukum.
7. Kecendrungan euforia otonomi daerah menimbulkan daerah yang berlebih dan merasa paling berhak mengatur daerah tanpa memperhatikan aturan dan perundang-undangan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam pemecahan masalah isu-isu strategis tersebut, rancangan awal terhadap kegiatan di Kesbangpol pada tahun 2027 terdiri dari 6 program dan 39 kegiatan yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 Kegiatan;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terdiri dari 1 Kegiatan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik yang terdiri dari 1 Kegiatan;

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari 1 Kegiatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang terdiri dari 1 Kegiatan;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang terdiri dari 1 Kegiatan;

RKPD tahun 2027 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2026.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Dari RPJM Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, tergambar bahwa luasnya cakupan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dan semua tupoksi tersebut mengarah kepada Meningkatnya Komitmen dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap Berjalannya Proses Demokratisasi dan dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Program Pembangunan daerah Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan beberapa indikator kinerja (*outcome*) :

1. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah;
2. Tingkat partisipasi pemilih dalam PILKADA;
3. Pemberdayaan dan mengoptimalkan forum kemitraan masyarakat serta Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Adapun sasaran yang ingin di capai adalah, Meningkatnya Peran dan Fungsi Partai Politik, menguatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik dan tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang maju, sejahtera dan demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa dan etika politik menuju masyarakat berkualitas dan berbudaya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, merupakan dasar dan acuan aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terencana, terarah dan terkoordinasi. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima)

tahun kedepan pada hakekatnya merupakan pengembangan rencana strategis secara berkelanjutan.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mempertahankan Stabilitas Sosial	1. Meningkatkan Pendidikan Politik di Masyarakat	1.1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Selatan	81,79	82,48	83,65	84,45	85,13	85,73
		2. Penguatan Ketentraman di Masyarakat	2.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,01	78,15	78,35	78,85	79,01	79,50
			2.2. Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2027

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan agar lebih terarah dan operasional perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan disusun berdasarkan kriteria akseptabilitas, fleksibilitas, terukur, pendorong kinerja, dan kesesuaian dengan visi dan misi agar mudah dipahami, guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Berdasarkan pendekatan diatas, maka tujuan jangka menengah pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah mewujudkan Terwujudnya Sumatera Selatan yang Aman, damai, kondusif dan Prtisipatif sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama (Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualita).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagai indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi ke-5 dalam RPJMD Sumatera Selatan ***“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”***.

Adapun Program dan Kegiatan Tahun 2027 tersebut secara rinci dapat dilihat pada Lampiran

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2027 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja selama tahun 2027 dan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Palembang, Februari 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Drs. H. Arinarsa Jaya Surya
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 197106031991011002

LAMPIRAN

Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	14,474,753,640			100%	16,655,704,368		
I.	8.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	390,000,000			7 dokumen	348,000,000		
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	3 Dokumen	155,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	3 Dokumen	186,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	3 Laporan	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	3 Laporan	120,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	1 Laporan	35,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	42,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.01.08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	Palembang	1 Data	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Data	120,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
II.	8.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah		100%	8,138,987,000			100%	9,766,784,400		
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	53 Orang/Bulan	7,663,987,000	Pendapatan Asli Daerah	-	44 Orang/Bulan	9,196,784,400	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 Dokumen	400,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	480,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	1 Dokumen	40,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	48,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	24,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	1 Laporan	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	18,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
III.	8.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	270,000,000			100%	324,000,000		
	8.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	1 Paket	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Paket	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	8 Orang	70,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	8 Orang	84,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
IV.	8.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	1,230,000,000			100%	1,476,000,000		
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Paket	120,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Paket	400,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Paket	480,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	1 Paket	100,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Paket	120,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Palembang	1 Dokumen	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	18,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	1 Laporan	600,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	720,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	1 Dokumen	15,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	18,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
V.	8.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		25 jenis	795,000,000			25 jenis	360,000,000		

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palembang	11 Unit	495,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	11 Unit	594,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Palembang	36 Unit	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	82 Unit	360,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
VI.	8.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%	1,850,766,640			100%	2,220,919,968		
	8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1 Laporan	20,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	24,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	450,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	540,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	1 Laporan	1,380,766,640	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	1,656,919,968	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
VII.	8.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik Daerah		100%	1,800,000,000			100%	2,160,000,000		
	8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Palembang	36 Unit	1,000,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	34 Unit	1,200,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	1 Unit	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Unit	360,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	80 Unit	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	25 Unit	600,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		70.00%	5,350,000,000			75%	6,420,000,000		
I.	8.01.02.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		6 Dokumen	5,350,000,000			6 Dokumen	6,420,000,000		

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Sumsel	250 Orang	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	250 Orang	300,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Sumsel	100 Orang	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	100 Orang	300,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Provinsi Sumsel	1 Laporan	350,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	420,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Provinsi Sumsel	50 orang	4,500,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	45 Orang	5,400,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		60%	15,650,000,000			65%	18,780,000,000		
I.	8.01.03.1.01	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika, budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik		7 Dokumen	15,650,000,000			7 Dokumen	18,780,000,000		

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	2 Dokumen	50,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	2 Dokumen	60,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	14,830,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	17,796,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumsel	100 Orang	120,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	150 Orang	144,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumsel	550 Orang	500,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	550 Orang	600,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Provinsi Sumsel	1 Laporan	150,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	180,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		4,0%	1,075,000,000			4,5%	1,290,000,000		
I.	8.01.04.1.01	Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		3 Dokumen	1,075,000,000			3 Dokumen	1,290,000,000		
	8.01.04.1.01.01	Penyusunan program kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	250,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	300,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.04.1.01.02	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Sumsel	50 Orang	125,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	200 Orang	150,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Sumsel	200 Orang	300,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	200 Orang	360,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Provinsi Sumsel	1 Laporan	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan		25%	800,000,000			40%	960,000,000		
I.	8.01.05.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		3 Dokumen	800,000,000			3 Dokumen	960,000,000		
	8.01.05.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Sumsel	500 Orang	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	600 Orang	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Sumsel	300 Orang	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	600 Orang	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Provinsi Sumsel	1 Laporan	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100%	200,000,000			100%	240,000,000		
I.	8.01.06.1.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		6 Dokumen	200,000,000			6 Dokumen	240,000,000		
	8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	200,000,000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	240,000,000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Nomor	Kode	PMD 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028		Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8.01.06.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Provinsi Sumsel	3 Dokumen	250.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	300.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Sumsel	100 Orang	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	250 Orang	240.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Sumsel	400 Orang	300.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	100 Orang	360.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Provinsi Sumsel	1 Laporan	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Laporan	120.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Provinsi Sumsel	1 Dokumen	700.000.000	Pendapatan Asli Daerah	-	1 Dokumen	840.000.000	Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
JUMLAH						39.099.753.640				46.205.704.368		

Palembang, Februari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Selatan,





GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 25 Februari 2026

Nomor : 000.7.74/ 6477/Ban.KBP/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Usulan Kenaikan Nilai Hibah Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2027

Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri RI
cc. Dirjen Polpum Kemendagri RI
Di - Jakarta

Berdasarkan usulan pengajuan kenaikan nilai hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik oleh DPD/DPW Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan keputusan yang disepakati bersama oleh Tim Penilai Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam rapat untuk usulan kenaikan nilai hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk Tahun 2027 sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) / suara sah dari semula Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) / suara sah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Surat Usulan Pengajuan Kenaikan Nilai Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari masing-masing DPD/DPW Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

21 Mei 2026

Nomor : 200.2.1/e-585/Polpum
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Atas Kenaikan
Besaran Nilai Bantuan Keuangan
Partai Politik Provinsi Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2027

Yth. Gubernur Sumatera Selatan

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 000.7.7.1/0473/Ban.BKP/2026 Tanggal 25 Februari 2026 Hal Usulan Kenaikan Nilai Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2027 serta menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 900/2309/Polpum Tanggal 6 April 2021 Perihal Permohonan Bantuan Fasilitas Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik, bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan usulan kenaikan bantuan keuangan dimaksudkan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap usulan kenaikan besaran bantuan keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027, prinsipnya kami memberikan persetujuan dengan tetap mempertimbangkan kembali setelah terpenuhinya belanja urusan wajib dan mengikat, belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat, serta tidak mengganggu program prioritas. Selanjutnya agar saudara mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum



Akmal Malik

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Gubernur Sumatera Selatan
cq. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
melalui Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 200/ 133 /Ban.KBP/2026
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Tanggal : 21 Mei 2026
Hal : Laporan Hasil Rapat Tim Penilai Kenaikan Nilai Hibah Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan

1. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi dari Tim Penilai Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kemendagri RI pada hari Kamis, 9 April 2026 pukul 09.00 WIB s/d selesai di ruang rapat *Situation Room* lantai 4 gedung F Ditjen Polpum Kemendagri RI dan Surat Dirjen Polpum Kemendagri RI Nomor : 200.2.1/e-585/Polpum tanggal 21 Mei 2026, Perihal Persetujuan atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 (terlampir).
2. Sehubungan hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 8 Permendagri Nomor 78 tahun 2020 dinyatakan antara lain bahwa persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Bantuan Keuangan Partai Politik menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan partai politik di tingkat provinsi, yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut, terima kasih

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. ARINARSA JS
PEMBINA UTAMA MADYA (IV.d)
NIP 197106031991011002

Paraf Hierarki	
Sekretaris Badan Kesbangpol Prov. Sumsel	
Kepala Bidang Poldagri Badan Kesbangpol Prov. Sumsel	
Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan Kesbangpol Prov. Sumsel	

 26/ 26
05



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kapten F. Tendean No. 1059 Telp. (0711) 354715 – 370030
Palembang Kode Pos 31129

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
c.q. Bapak Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dari : Kasubbag Program dan Anggaran
Tanggal : 15 Juni 2026
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Hal : Perencanaan dan penganggaran hibah melalui APBD

Wth. Kabid 2
u/bahon, koord hibah
SKR/ka Daerah
17.11.2026

Sehubungan dengan akan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2027 serta memperhatikan kenaikan hibah Partai Politik sisa masa periode 2027-2029 yang bersumber dari APBD, dengan ini di sampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri nomor : 200.2.1/e-585/Polpum tanggal 21 Mei 2026 hal Persetujuan atas kenaikan besaran nilai bantuan keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2027;
2. Amanat Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2021 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, bahwa :
 - Pada pasal 6 ayat 1 : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik dapat menyampaikan usulan hibah baik berupa uang atau berupa barang/jasa secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala Perangkat Daerah paling lambat sebelum RKPD atau sebelum Perubahan RKPD ditetapkan;
 - Pada pasal 9 ayat 1 : Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah yang ada pada Perangkat Daerah yang bersangkutan baik berupa uang atau berupa barang/jasa untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi dan/atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan;
3. Pada saat ini merupakan tahapan Perencanaan dan Penganggaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan selanjutnya akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 Provinsi Sumatera Selatan yang akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 30 Juni 2026;
4. Sehubungan dengan hal diatas sebagai saran dan masukan kiranya dapat menerbitkan Keputusan Kepala Daerah atas besaran kenaikan hibah Partai Politik dimaksud sebagai dasar proses perencanaan dan penganggaran untuk sisa masa periode 2027-2029.

Demikian di sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KASUBBAG PROGRAM DAN ANGGARAN,

Yasir Arasi

YASIR ARASI, S.T., M.Si
Pembina / IV.a
NIP. 197502251994121001

Sebelum
YTC, Didit 2
Koord guru
Kep Koda
Rupad 2022



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 375/KPTS/BAN.KBP/2026

TENTANG

**KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH
KURSI PADA HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029 DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2027 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 86/KPTS/BAN.KBP/2026 telah ditetapkan Tim Penilai Kenaikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten/Kota dan Partai Politik Provinsi Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor 000.7.71/0473/Ban.KBP/2026 tanggal 25 Februari 2026 hal Usulan Kenaikan Nilai Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2027;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 200.2.1/e-558/Polpum tanggal 21 Mei 2026 hal Persetujuan Atas Kenaikan Besaran Nilai Bantuan Keuangan Partai Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan hasil Pemilu periode berikutnya dan dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik;
- e. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 73 Tahun 2024, telah ditetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi Pada Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 41);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 73 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kenaikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi Pada Hasil Pemilu Periode Tahun 2024-2029 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2029 dari Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per suara sah menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per suara sah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 sampai dengan Tahun Anggaran 2029 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 JUNI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I. Up. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri R.I di Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 375 /KPTS/BAN.KBP/2026
 TANGGAL : 18 JUNI 2026

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2024-2029
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2027 SAMPAI DENGAN 2029

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7	478.691	5.000	2.393.455.000
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDA)	11	716.413	5.000	3.582.065.000
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	9	543.067	5.000	2.715.335.000
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	12	749.720	5.000	3.748.600.000
5.	Partai Nasdem	10	526.214	5.000	2.631.070.000
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	387.487	5.000	1.937.435.000
7.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1	49.435	5.000	247.175.000
8.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	90.297	5.000	451.485.000
9.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	411.711	5.000	2.058.555.000
10.	Partai Demokrat (PD)	8	518.680	5.000	2.593.400.000
11.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1	116.485	5.000	582.425.000
12.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	192.097	5.000	960.485.000
	JUMLAH	75	4.780.297	5.000	23.901.485.000

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2027
PERANGKAT DAERAH : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini *Rabu* tanggal *04* bulan *Maret* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027, yang dihadiri pihak terkait sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Berita Acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Penjelasan dari Bappeda mengenai Hasil Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
2. Tanggapan dan saran dari peserta rapat Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang telah dirangkum menjadi hasil diskusi sebagaimana hasil pembahasan pada Lampiran II dan Lampiran III.

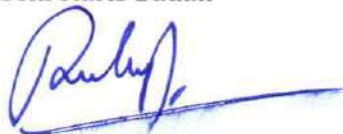
MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati Hasil Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I, II dan III), yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan ini;
- KETIGA : Berita acara hasil pembahasan ini beserta lampirannya menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2027 Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

Palembang, 04 Maret 2026

Perangkat Daerah :
Sekretaris Badan



H. Ricky Fernandi, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 198102132000121001

Pimpinan Rapat
Kabid Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial,
dan Kesejahteraan Rakyat



Sultan M. Syah, S.E., S.H., MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.197303251998031002

Keterangan :

- Lampiran I : Absensi
Lampiran II : Tabel Ranwal Renja 2027 hasil verifikasi yang disertai kolom catatan pembahasan
Lampiran III : Notulensi

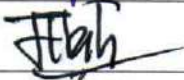
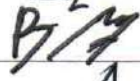
Lampiran I

DAFTAR HADIR PESERTA PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2027 (PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Provinsi : Sumatera Selatan

Tanggal : 04 Maret 2026

Tempat : Ruang Rapat Bidang PKK Lt.III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Ricky Fernandi, S.STP., M.Si	Bakesbangpol	Sekretaris	
2	Sultan M-syah, SE., SH., MM	Bappeda	Kabid PKK	
3	YASIR ARASI	Bakesbangpol	Kasubag Program	
4	BELLY Pratama	- II -	KASUBBID	
5	Kasubbid / Eku k	- II -	Kasubbid I	
6	MUMTAZAH	- II -	Kasub (Ideologi)	
7	M. Tazfan	Bappeda	JFP	
8	Yudike	Bappeda	JFP	



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **26** Bulan **Februari** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Uyunul Bayani Amsak, S.IP, M.A	199312172015072001	Kepala Bagian Perencanaan	Ditjen Polittk dan Pemerintahan Umum
2	Maharani, SE, MBA	198311042009012005	Perencana Ahli Madya	Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas
3	Yudika Agung Lesmana, S.IP, MM	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
4	Yasir Arasi, S.T, M.Si	197502251994121001	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	Bakesbangpol Provinsi Sumatera Selatan

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	83.65	83.65
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	83.65	83.65
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	83.65	83.65
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	300
Catatan Pembahasan : Terdapat penambahan target yang disepakati yang diakomodir melalui kegiatan-kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan pelajar.					



2.	8.01.03.1.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	550
Catatan Pembahasan : Disepakati target sebesar 550 yang diakomodir melalui kegiatan kegiatan sosialisasi untuk pendidikan politik.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.1.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	300
Catatan Pembahasan : Terdapat penambahan target sebesar 300 yang dapat diakomodir melalui kegiatan-kegiatan rapat bidang kewaspadaan dini yang melibatkan stakeholder terkait.					
2.	8.01.06.1.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	300
Catatan Pembahasan : Terdapat penambahan target sebesar 300 yang dapat diakomodir melalui kegiatan-kegiatan rapat bidang kewaspadaan dini yang melibatkan stakeholder terkait.					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





HASIL PEMBAHASAN DESK PROSN/TEMATIK PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pada hari ini, Hari Kamis Tanggal 05 Bulan Maret Tahun 2026 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani ProSN/Tematik Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Uyunul Bayani Amsak, S.IP, M.A	199312172015072001	Kepala Bagian Perencanaan	Ditjen Polittk dan Pemerintahan Umum
2	Maharani, SE, MBA	198311042009012005	Perencana Ahli Madya	Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas
3	Irene Camelyn Sinaga	197407111994022004	Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4	Muhammad Sabri	196707141992031005	Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
5	Devi Vijayanti Octavia	197802272006051001	Analis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP
6	Galuh Ibrahim, SE, MM	197702172010011000	Analis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Jaringan dan Pembudayaan BPIP
7	Hendry Aprian Mutisilu, S.T	198004152009011009	Kasubbag Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
8	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PROSN/TEMATIK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	PROSN	PROYEK/ KEGIATAN PROSN	KINERJA PROSN/TEMATIK	INDIKATOR OUTCOME PROSN/TEMATIK	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).			Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Indeks Pelaksanaan Peta Jalan PIP	Indeks	50	50

Catatan Kesepakatan : Penyampaian Matriks Peta Jalan PIP final dilakukan paling lambat Tanggal 30 Maret 2026

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
----	-------------------	------------------------------------	------------------------	--------	--------



1.	1.01.02.1.01.00 66	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Penjelasan kesepakatan target di catatan
Catatan Pembahasan : Pemerintah Provinsi Sumatera selatan mendukung pembinaan ideologi Pancasila melalui penyediaan BTU Pendidikan Pancasila di Satuan pendidikan SMA dan SMK di tahun ajaran 2026/2027 dan penganggaran tahun 2027. Pemprov Sumsel selama ini sudah melakukan kegiatan penyediaan buku BTU Pendidikan Pancasila. Pemprov Sumsel mengundang kehadiran BPIP dalam Musrembang Provinsi 2026. Catatan Kesepakatan target : Target penyediaan buku melalui 10% Dana BOS akan menjadi prioritas utama pengadaan BTU Pendidikan pancasila SMA dan SMK.					
2.	1.01.02.1.02.00 61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Penjelasan kesepakatan target di catatan
Catatan Pembahasan : Pemerintah Provinsi Sumatera selatan mendukung pembinaan ideologi Pancasila melalui penyediaan BTU Pendidikan Pancasila di Satuan pendidikan SMA dan SMK di tahun ajaran 2026/2027 dan penganggaran tahun 2027. Pemprov Sumsel selama ini sudah melakukan kegiatan penyediaan buku BTU Pendidikan Pancasila. Pemprov Sumsel mengundang kehadiran BPIP dalam Musrembang Provinsi 2026. Catatan Kesepakatan target : Target penyediaan buku melalui 10% Dana BOS akan menjadi prioritas utama pengadaan BTU Pendidikan pancasila SMA dan SMK.					

2. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.02.1.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	250
Catatan Pembahasan : Pada sub kegiatan ini target yaitu sebanyak 250 orang dengan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp. 250.000.000,-					
2.	8.01.02.1.01.00 11	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Pada sub kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, target sejumlah 1 dokumen dengan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp. 100.000.000,-. Untuk pengangkatan PDP sudah ada namun di RKPD Sumatera Selatan belum ada.					
3.	8.01.02.1.01.00 12	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	52
Catatan Pembahasan : Pada sub kegiatan Pembentukan Paskibraka target sebanyak 52 orang dengan pagu anggaran Tahun 2027 sebesar Rp. 4.500.000.000,-.					

IV. RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Rekomendasi Hasil Pengendalian Pembinaan Ideologi Pancasila	Rekomendasi	5
2.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Fasilitasi dan Pembinaan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila	Kelompok Masyarakat	100
3.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Rekomendasi Hubungan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila	Rekomendasi	5
4.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Rekomendasi	4
5.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Rekomendasi Hasil Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila	Rekomendasi	5
6.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Fasilitasi dan Pembinaan Pengarusutamaan Nilai Pancasila dan Pembudayaan Gerakan Relawan Pancasila	Orang	16000
7.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Buku Pendidikan yang Disusun, Dikembangkan dan Dinilai	Buku	93
8.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Rekomendasi Kajian Kebijakan Strategis Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	Rekomendasi	2
9.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pembudayaan Nilai Pancasila	Rekomendasi	2
10.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Pemberian Penghargaan Pembinaan Ideologi Pancasila	Kegiatan	3
11.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Rekomendasi Standardisasi Materi Pembinaan Ideologi Pancasila	Rekomendasi	2

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
12.	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	Fasilitasi dan Pembinaan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	6903

V. CATATAN UMUM HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk ProSN/Tematik Pembinaan Ideologi Pancasila TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN BANYUASIN

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Banyuasin** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANYUASIN

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	Ahmad Alpajri	197807162006041016	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik	Badan Kesbangpol Kabupaten Banyuasin

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : Sasaran kegiatan masyarakat, siswa calon pemilih pemula.					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	45
Catatan Pembahasan : Saat ini target menggunakan jumlah parpol yang memperoleh kursi dan diganti menjadi 45 orang berdasarkan jumlah anggota DPRD dengan suara sah sebanyak 478.046 suara. Pemilihan kegiatan dan target akan disesuaikan.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40
Catatan Pembahasan : Rapat koordinasi tim terkait pengawasan orang asing.					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	30
Catatan Pembahasan : Rapat tim terkait koordinasi penanganan konflik.					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Banyuasin** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN EMPAT
LAWANG

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Empat Lawang** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN EMPAT LAWANG

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumsel
3	Sopian, S.IP, KP	196910232000031004	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang
4	Ferry Apriansyah, SE, MM	198004112015031002	Kepala Bidang Sosial dan Budaya	Bappeda Litbang Kabupaten Empat Lawang

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	85	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	85	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	85	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : Target 100 orang terdiri kader parpol dan tim verifikasi dan bimbingan terhadap pertanggungjawaban dana bankeu parpol.					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : Saat ini kegiatan digunakan untuk tim pemantau politik dan diarahkan kepada peningkatan partisipasi masyarakat menjelang pemilu yang akan datang.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : Target 100 orang terdiri dari OPD terkait dan mitra yang membidangi bidang intelejen.					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	32
Catatan Pembahasan : Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Empat Lawang** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN LAHAT

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **23** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Lahat** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAHAT

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumsel
3	Masdariansyah, SP.,MM	197610262010011003	Kabid Politik Dalam Negeri	Kesbangpol Kabupaten Lahat

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		



<https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : 57d34f9e32cd9b26c157184c077ff3f7
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 23 April 2026
Jam : 9:05:14 AM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : Direncanakan untuk pendidikan politik untuk kader partai ke Kementerian Pertahanan terkait bela negara serta					
2.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50
Catatan Pembahasan : Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
----	-------------------	------------------------------------	------------------------	--------	--------



1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	22
Catatan Pembahasan : Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini dalam bentuk rapat koordinasi perbulan dan monitoring serta sosialisasi dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan di lapangan.					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	21
Catatan Pembahasan : Direncanakan akan dianggarkan untuk tim pengawasan orang asing.					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Lahat** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KOTA LUBUK LINGGAU

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kota Lubuk Linggau** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA LUBUK LINGGAU

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	Dodi Does, SH,MAP	197606062009031004	Sekretaris	Badan Kesbangpol Kota Lubuk Linggau
4	Emmy Siswati, S.Pd,MM	197801162006042005	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappeda Kota Lubuk Linggau

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							



<https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : b6aba7aa04cb442f9bfa6e257613adfd
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 15 April 2026
Jam : 12:58:02 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	131475
Catatan Pembahasan : Disepakati					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan sebesar Rp75.000.000,- dan akan disesuaikan dengan kondisi keuangan saat itu					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	12
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,- untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	12
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,- untuk monitoring evaluasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I L A I			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

Mohon dukungan untuk capaian-capaian indikator Kesbangpol yaitu IDI, IKUB, IHai, Indeks Kewaspadaan

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kota Lubuk Linggau** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN MUARA ENIM

Pada hari ini, Hari **Senin** Tanggal **13** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Muara Enim** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUARA ENIM

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	H. Haryadi Muliawan, ST. MT	197412202001121003	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	70	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	70	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	70	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	70	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	70	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	70	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	200
Catatan Pembahasan : Disepakati target output 200 orang calon pemilih pemula sebagai peserta sosialisasi pendidikan politik					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	
Catatan Pembahasan :					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	25

Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan sebesar Rp50.000.000,- pada renja OPD

2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	25
----	-----------------------	---	---	-------	----

Catatan Pembahasan : Disepakati target 25 orang

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Muara Enim** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Musi Banyuasin** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	Aldy Rejasa, A.Md.Ak	200003112022011002	Pengelola Perencanaan	Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	78	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	78	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	78	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	585
Catatan Pembahasan : Sosialisasi dalam rangka peningkatan pendidikan politik terutama untuk pemilih pemula.					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50
Catatan Pembahasan : Agar lebih difokuskan pada pendidikan politik terhadap kader partai.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	160
Catatan Pembahasan : Disepakati					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	50
Catatan Pembahasan : Disepakati					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Musi Banyuasin** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Pada hari ini, Hari Kamis Tanggal 23 Bulan April Tahun 2026 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Musi Rawas telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumsel
3	Abdul Saleh	197595952919011001	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	300
Catatan Pembahasan : Sosialisasi pemilih pemula, pemuda dan pelajar					
2.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50
Catatan Pembahasan : Sosialisasi politik kepada kader partai					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
----	-------------------	------------------------------------	------------------------	--------	--------



1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	213
Catatan Pembahasan : Honorarium untuk kegiatan kerjasama intelejen di daerah di bawah naungan FKDM dengan melibatkan jejaring intelejen di kecamatan. Agar ditelaah nomenklatur jabatan untuk pemberian honor.					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Musi Rawas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **23** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Musi Rawas Utara** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumsel
3	Aan Bastian,SH.,M.Si	197811102002121002	Sekretaris	Badan Kesbangpol Kabupaten Muratara
4	Dewi Komala Sari, S.PdI.,M.Ag	198206282015042001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Kabupaten Muratara

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	77,50	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	74	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	77,50	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	74	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	77,50	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	74	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	30
Catatan Pembahasan : Bantuan keuangan kepada partai politik dan honorarium tim verifikasi dan kegiatan operasional pendukung. Jumlah suara sah 122.503 suara dengan jumlah anggota dprd 25 orang.					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : Anggaran kegiatan ini berupa monitoring ke partai politik terkait bantuan keuangan kepada partai politik. Akan ditambahkan kegiatan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	25
Catatan Pembahasan : Kegiatan berupa biaya mengikuti bimtek intelejen karena belum ada staf yang pernah mengikuti. Sehubungan dengan efisiensi kesbangpol Provinsi dikhawatirkan tidak terlaksana dan menyarankan untuk diubah atau ditambah kegiatan memperkuat koordinasi terkait kewaspadaan dini dengan instansi terkait dan dipertimbangkan penambahan anggaran guna kebutuhan tersebut.					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40
Catatan Pembahasan : Anggaran untuk honorarium, rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan monitoring.					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Musi Rawas Utara** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN OGAN ILIR

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **23** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Ilir** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN ILIR

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumsel
3	Rosmania	197010241998032003	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Kesbangpol Kabupaten Ogan Ilir

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	20
Catatan Pembahasan : Sosialisasi terkait Bantuan Keuangan Partai Politik					
2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
----	-------------------	------------------------------------	------------------------	--------	--------



1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	15
Catatan Pembahasan : Kegiatan monitoring lapangan dan koordinasi dengan melibatkan tim TKPD, FKDM dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	30
Catatan Pembahasan : Kegiatan rapat koordinasi TKPD, FKDM dan Tim Terpadu Konflik Sosial dan OPD terkait serta kegiatan monitoring.					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Ilir** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR

Pada hari ini, Hari **Senin** Tanggal **13** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ilir** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	H. Irawan Sulaiman. S.Sos, M.Si	196902101992031006	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Kabupaten OKI

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	79,95	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	79,95	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	79,95	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : Disepakati target 150 orang peserta					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	447534
Catatan Pembahasan : kesepakatan sementara 447.534 mengacu kepada jumlah suara sah yang mendapatkan kursi di DPRD, selanjutnya akan dikonsultasikan lebih lanjut terkait sub kegiatan untuk penganggaran bantuan keuangan partai politik dan perhitungan outputnya.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	10
Catatan Pembahasan : Disepakati					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	10
Catatan Pembahasan : Disepakati					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ilir** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.





PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

Pada hari ini, Hari **Senin** Tanggal **13** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	Abdullah, SE	196908101993031007	Sekretaris	Badan Kesbangpol Kabupaten OKU

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	79,95	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	
Catatan Kesepakatan :							



<https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : 1bcce306c51ec700063694bbdef28d4a
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 13 April 2026
Jam : 2:12:44 PM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	79,95	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	79,95	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : Disepakati target 150 orang khususnya pada pemilih pemula					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	36
Catatan Pembahasan : Disepakati					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	25
Catatan Pembahasan : Disepakati					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	25
Catatan Pembahasan : Disepakati					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU SELATAN

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumsel
3	Erni Oktariani	198910312015032001	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Kesbangpol Kabupaten OKUS

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan kegiatan sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula dan komunitas lainnya					
2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	50
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan kegiatan pendidikan politik untuk kader partai dan organisasi kemasyarakatan					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
----	-------------------	------------------------------------	------------------------	--------	--------



1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	50
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan kegiatan dialog kewaspadaan					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan kegiatan rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	Edy Susanto, S.E.	197803102007011007	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Kabupaten OKUT
4	Erick Jonh Beker	198611022025211023	Pengadministrasi Perkantoran	Bapperida Kabupaten OKUT

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	200
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan sebesar Rp52.388.000,- untuk sosialisasi pendidikan politik pada pemilih pemula.					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	379.891
Catatan Pembahasan : Agar target disesuaikan dengan satuan output subkegiatan yaitu orang misalnya jumlah suara sah sebagai pembentuk besaran bantuan keuangan parpol atau jumlah anggota dewan. Nanti akan dikonsultasikan kembali dengan Kemendagri.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	200
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan sebesar Rp 80.078.000,-					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	50
Catatan Pembahasan : Akan dianggarkan sebesar Rp246.277.000,-					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KOTA PAGAR ALAM

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kota Pagar Alam** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PAGAR ALAM

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	Putri Mega Lestari	199608272025212015	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol Kota Pagaralam
4	M Bahshofi Jaya Abadi	199108242019021004	Analisis Pemerintah Daerah	Bapperida Kota Pagaralam

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	80	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	100	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150

Catatan Pembahasan : Agar dipersiapkan kegiatan yang bertujuan peningkatan partisipasi pemilih dengan anggaran Rp100.000.000,-



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	41
Catatan Pembahasan : Angka target adalah pengurus partai dan tim verifikasi Bankeu Parpol. Selanjutnya akan dikonsultasikan terkait subkegiatan dan angka target bankeu parpol.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	200
Catatan Pembahasan : Disepakati					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : disepakati					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kota Pagar Alam** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KOTA PALEMBANG

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **16** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kota Palembang** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- 1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- 4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- 5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumsel
3	Rosmaida Simanjuntak, SH., M.Si .	197101231996032002	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Kota Palembang

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	500
Catatan Pembahasan : Kegiatan pendidikan politik dan Dana Bantuan Keuangan Parpol. Target diturunkan karena terdapat efisiensi anggaran.					
2.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	200
Catatan Pembahasan : Kegiatan verifikasi dana hibah dan akan ditambahkan kegiatan pendidikan politik					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
----	-------------------	------------------------------------	------------------------	--------	--------



1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : Akan dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan bahaya radikalisme dan terorisme kepada ASN dan pelajar.					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	120
Catatan Pembahasan : Kegiatan tim penanganan konflik sosial dan forum kewaspadaan dini masyarakat					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kota Palembang** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

Pada hari ini, Hari **Senin** Tanggal **13** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	Ely Elfrida	199507152023212032	Perencana Ahli Muda	Badan Kesbangpol Kabupaten PALI

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							



<https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/>
DOK ID : e6cd2f55e6af19fe4c4db804923f2f8f
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 13 April 2026
Jam : 11:40:56 AM

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95		
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77		
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1000
Catatan Pembahasan : Disepakati					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : Disepakati					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	240
Catatan Pembahasan : Disepakati					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150
Catatan Pembahasan : Disepakati					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	NIHIL			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.



PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN KOTA PRABUMULIH

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **15** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kota Prabumulih** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PRABUMULIH

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yasir Arasi	197502251994121001	Kasubag Program dan Anggaran	Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan
2	Yudika Agung Lesmana	197408252009031001	Perencana Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
3	Joni Panhar, ST, MM	198006122006041007	Sekretaris Badan	Badan Kesbangpol Kota Prabumulih
4	Amri Juri, ST	197107092006041008	Perencana Ahli Pertama	Bappeda Kota Prabumulih

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	00	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	00	
Catatan Kesepakatan :							



NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONA L 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	00	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	00	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	00	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	00	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	250
Catatan Pembahasan : Disepakati target menjadi 250 orang					



2.	8.01.03.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	455
Catatan Pembahasan : Target jumlah pengurus partai dan akan dikonsultasikan dan disesuaikan dengan arahan kemendagri					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.00 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : sosialisasi kepada RT/ RW, linmas kelurahan/ desa target 100					
2.	8.01.06.2.01.00 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	80
Catatan Pembahasan : Disepakati					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	3
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kota Prabumulih** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.